

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA: ANALISIS TERHADAP SEKTOR DOMESTIK DAN STABILITAS INFLASI

Aqilla Muhammad Ramadhan¹, Aprilliantoni²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam "45" Bekasi

Email : aqillamhammad@gmail.com¹, aprilliantoni@unismabekasi.ac.id²

ABSTRAK

COVID-19 merupakan masalah kesehatan global termasuk di Indonesia. Peningkatan kasus COVID-19 terbukti cukup berdampak signifikan terhadap perekonomian secara global yang mungkin memiliki mempengaruhi stabilitas di Indonesia. Metode pengumpulan data ini adalah metode studi kepustakaan dengan tipe data sekunder. Data adalah diambil dari Internet sehubungan dengan validitas informasi seperti informasi resmi pemerintah, situs online resmi dan hasil olahan data yang valid. Analisis data disajikan dalam bentuk grafik dan dilengkapi dengan narasi deskriptif. Berdasarkan penelitian tersebut. Dampak pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian di Indonesia. Sektor yang terkena dampak selama pandemi COVID-19 adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya. Tetapi sektor ekonomi yang paling terkena dampak COVID-19 adalah sektor domestik. Mengoptimalkan potensi dalam negeri, penurunan BI-7Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), suku bunga fasilitas deposito, dan suku bunga fasilitas pinjaman, pemantauan global, dan pembangunan ekonomi domestik yang dilakukan oleh Indonesia dinilai secara tepat agar inflasi dan stabilitas tetap terjaga dan terkontrol.

Kata Kunci : Investasi Asing, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

The increase in COVID-19 cases has proven to have a significant impact on the global economy which may affect stability in Indonesia. This data collection method is a literature study method with secondary data type. Data is taken from the Internet with respect to the validity of information such as official government information, official online sites and valid processed data. Data analysis is presented in graphical form and complemented by descriptive narratives. Based on the research, the impact of the COVID-19 pandemic has an impact on the economy in Indonesia. The sectors affected during the COVID-19 pandemic are transportation, tourism, trade, health and other sectors. But the economic sector most affected by COVID-19 is the domestic sector. Optimizing domestic potential, reducing the BI-7Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), deposit

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

facility rates, and lending facility rates, global monitoring, and domestic economic development carried out by Indonesia are considered appropriate so that inflation and stability are maintained and controlled.

Keywords: Foreign Investment, Economic Growth

PENDAHULUAN

COVID-19 merupakan masalah kesehatan global termasuk Indonesia. Informasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 31 Desember 2019 mengatakan ada kasus kluster pneumonia dengan etiologi baru di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dan kemudian berkembang di luar Cina. Pada 30 Januari 2020, COVID-19 ditetapkan menjadi Darurat Kesehatan Masyarakat Kepedulian Internasional (PHEIC). Pada 11 Maret 2020, COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi. Indonesia pertama kali dilaporkan 2 kasus positif pada tanggal 2 Maret 2020 dan kasus positif terus meningkat (Kementerian Kesehatan RI, 2020a). Hingga 25 April 2020, Indonesia sudah melaporkan 8.211 kasus positif, 689 kasus meninggal, 1.002 kasus sembuh dari 50.563 orang yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan 42.352 negatif (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Meningkatnya kasus COVID-19 berdampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh PBB berdampak pada transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya. Kebijakan "lock down" diambil oleh berbagai negara untuk mencegah penyebaran covid-19 lebih lanjut, sehingga kegiatan ekonomi terhambat dan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia ke depan termasuk perekonomian Indonesia pertumbuhan. Pemerintah mendorong Kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah Pemerintah (PEMDA) mempercepat belanja terutama pada jadwal triwulan I 2020. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, serta penurunan harga komoditas (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tertekan sebesar 2,1 persen. Hal ini dikarenakan penyebaran Covid-19 yang terus meluas baik dalam negeri dan luar negeri. Bank Indonesia (BI) juga telah merevisi proyeksi ekonomi pertumbuhan RI di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen. Pandemi Covid-19 akan memiliki implikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia tahun ini, seperti yang terjadi bersamaan dengan penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan. Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu isu yang diperdebatkan dan yang paling penting diskusi makro ekonomi antara ekonom makro, pembuat kebijakan dan moneterotoritas di semua negara (Wollie, 2018). Inflasi yang terjadi pada tahun ini dalam proyeksi akan ditingkatkan menjadi 3 persen, karena pasokan makanan yang ketat dan depresiasi mata uang yang diharapkan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan harga nonsubsidi BBM, serta tambahan subsidi listrik dan pangan. Namun, pada tahun 2021 inflasi diyakini akan kembali normal, yakni 2,8 persen. Yang biasanya bisa tumbuh menjadi 5,02 persen. Sementara dari sisi inflasi, pariwisata dan ekspor komoditas pendapatan, diperkirakan terjadi penurunan yang mengakibatkan defisit transaksi berjalan mencapai 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2020 (Kementerian Keuangan RI, 2020). Menurut A. Ademuyiwa (2019) ketika perekonomian

mengalami inflasi yang persisten, Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, hal ini sebenarnya tidak mencerminkan pertumbuhan yang sebenarnya di suatu negara ekonomi. Oleh karena itu, tingkat inflasi harus dikurangi dari PDB untuk mendapatkan pertumbuhan riil persentase, yang disebut PDB riil.

Pemerintah juga melakukan re-focusing budgeting dan meluncurkan Stimulus fiskal Paket jilid I dan jilid II yang diharapkan dapat mendukung sektor riil. Secara umum, prioritas utama pemerintah saat ini adalah dukungan untuk sektor kesehatan, penguatan sosial jaring pengaman dan sektor usaha penyelamatan (Kementerian Keuangan RI, 2020). Namun, untuk Indonesia, COVID-19 sudah memiliki implikasi signifikan bagi sektor pariwisata, menurunkan kinerja ekspor, kinerja pertumbuhan ekonomi. Sektor utama yang paling berdampak adalah sektor akomodasi, transportasi, ritel, dan manufaktur dari transaksi saat inidefisit neraca (CAD) (Media Indonesia, 2020). Jika ditinjau dari ekonomi pekerja itu didasarkan pada Departemen Luar Negeri PBB Urusan Ekonomi dan Sosial (UN-des), jutaan pekerja terancam kehilangan pekerjaan ketika hampir 100 negara menutup perbatasan nasional dalam hal ekonomi global kontraksi 0,9 persen atau lebih tinggi pada akhir tahun 2020 (Surabaya Net, 2020). Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan Informasi Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Tipe data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data diekstraksi dari Media online dengan kriteria data adalah diambil dari situs resmi Informasi Pemerintah Indonesia, situs resmisitus berita online, dan mengolah data dari sumber yang relevan. Kriteria data yang tidak diambil adalah informasi website pribadi (blog), kutipan pribadi orang (nonpemerintah), media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya), dan media chatting. Itu berbagai pembaruan informasi dimulai dari Februari 2020 hingga Mei 2020. Data yang dikumpulkan berasal dari publikasi di Indonesia (online).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Manulife Investment Management, Indonesia merupakan negara yang memiliki penurunan suku bunga, penurunan sektor utama seperti sektor pariwisata, penerbangan transportasi, properti, dan jaminan sosial serta penurunan GWM (Giro Wajib) (Manulife Investment Management, 2020). Di daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tentu berdampak pada ekonomi. Salah satu daerah yang menerapkan PSBB, yaitu Jakarta, adalah perhitungan skenario agar hasil yang diperoleh kegiatan ekonomi tidak berhenti sama sekali. Tentang 75% berhenti selama 14 hari dalam skenario terburuk, sehingga memiliki implikasi -2,78% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan penurunan pendapatan rumah tangga sebesar -2,77% (CNBC, 2020).

Jika ditinjau dari ketenagakerjaan, akan berdampak pada 1% pemutusan hubungan kerja berdasarkan pada sektor, perdagangan, hotel, dan restoran, Transportasi dan komunikasi, jasa, industri, sektor listrik, gas, air bersih dan penggalian dan pertambangan. Hasil penghentian hubungan tersebut diprediksi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi -0,8% (CNBC, 2020). Pada aspek konsumsi lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga, akan penurunan sebesar

1,78% atau skenario terburuk 1,91%. Penyebab penurunannya kurang positif investasi (pertumbuhan 1%) atau perkiraan penurunan terbesar sebesar 4%, sektor ekspor yang turun 14% menjadi 15,6%, dan impor yang turun 14,5% menjadi 16,65% (Kata Data, 2020).

Berdasarkan sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19, rumah tangga Sektor tersebut telah menjadi sektor yang sangat signifikan karena tidak melakukan kegiatan ekonomi, Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) dan korporasi menjadi sektor yang terkena dampak dan implikasinya di sektor keuangan (Kata Data, 2020). Secara umum, dampak COVID-19 cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pelambatan ekonomi global dan kinerja industri manufaktur akan berdampak terhadap kinerja ekspor di Indonesia. Menurunnya produktivitas ekonomi (20 sampai 25 persen), yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi China 5 persen, menimbulkan berbagai kondisi (CSIS Indonesia, 2020).

Tabel 1. Persentase Impor Indonesia dari China Tahun 2018

Jenis Barang/Produk	Persentase (%)
Barang modal	39.33
Barang setengah jadi	23.14
Suku Cadang dan Komponen Mesin	36.27
• Bagian dan komponen peralatan kantor dan komunikasi	29.05
perangkat	
• Suku cadang dan komponen kendaraan bermotor	17.48

Sumber: CSIS Indonesia

Sumber bahan baku atau barang modal, tentunya Indonesia perlu mencari sumber tersebut dari negara lain malah harganya lebih mahal. Mengoptimalkan potensi dalam negeri adalah penting untuk dilakukan sebagai akibat dari perlambatan ekonomi China dan diperkirakan akan menjadi pusat produksi alternatif sehingga dapat berkontribusi pada pasokan global selama COVID-19 pandemi. Langkah Indonesia seperti penurunan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), suku bunga Deposit Facility, dan suku bunga Lending Facility, pemantauan global dan Pembangunan ekonomi domestik yang dilakukan oleh Indonesia dinilai tepat sehingga inflasi dan stabilitas tetap terkendali.

Kementerian Keuangan RI mencatat sedikitnya delapan kerugian akibat merebaknya virus. Pertama, hingga 11 April lebih dari 1,5 juta karyawan mogok atau pemutusan hubungan kerjaketenagakerjaan (PHK) dan dirumuskan. 1,2 juta pekerja tersebut berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Kedua, Pembelian Indonesia Indeks Manajer (PMI) di bawah level 50 hanya 45,3 pada Maret 2020. Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Februari, dengan rincian: 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Keempat, kerugian sekitar Rp 207 miliar pendapatan di sektor jasa udara, dengan kerugian sekitar Rp 48 miliar disumbangkan oleh China penerbangan. Kelima, jumlah wisatawan turun menjadi 6.800 per hari, terutama wisatawan dari China. Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan tingkat hunian menurun sekitar 6.000 hotel di Indonesia bisa mencapai 50%. Hal ini dapat mempengaruhi penurunan pariwisata devisa lebih dari setengah tahun yang lalu. Ketujuh, seluruh impor Indonesia Januari-Maret 2020 turun 3,7% year to date (YTD). Kedelapan, inflasi Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year (yoy) juga disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan karena beberapa harga pangan

melonjak. Namun, terjadi deflasi pada berbagai komoditas cabai dan tarif angkutan udara (Santoso, 2020).

Tabel 2: Kerugian Ekonomi

Variabel	Dampak
pekerja	1,5 juta pekerja mengalami istirahat
Indeks Manajer Pembelian (PMI)	Di bawah level 50
Penerbangan	> 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan
Air Service	Kehilangan pendapatan sebesar Rp 207 miliar
Turis	Turun drastis 6.800 per hari
Hotel dan Restoran	Terjadinya penurunan sekitar tingkat hunian 6.000 hotel di Indonesia mencapai 50%
Impor	Turun 3,7% year to date (YTD)
Inflasi	Inflasi 2,96% year on year (yoy)

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada 18 Maret 2020, semua indoor dan outdoor kegiatan di semua sektor yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda sementara dalam rangka menekan penyebaran Corona. Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata lumpuh, sehingga pengangguran semakin bertambah karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan wisata maupun masyarakat luar. Bukan hanya sementara kelumpuhan sektor pariwisata, tetapi karyawan dari jenis perusahaan lain telah mengalami dampak pandemi Covid-19, aktivitas pekerja yang biasanya dilakukan di luar rumah dipaksakan langsung dilakukan di dalam rumah, dan banyak pegawai yang diancam pemutusan hak kerja (PHK) karena banyaknya pekerjaan yang tidak memungkinkan dilakukan di rumah, seperti halnya kegiatan produksi yang bergantung pada mesin yang ada ditempat produksi. Penghentian pekerjaan ini juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor ke negara tertentu sehingga akan menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. Ada juga yang lain penyebab pemecatan karyawan karena kelangkaan bahan baku yang akan diproduksi diimpor dari luar negeri seperti dari China sehingga akan menghambat industri kegiatan.

Perusahaan yang berhenti beroperasi dan peningkatan jumlah pengangguran tarif dapat menghambat dan menurunkan produk domestik bruto (PDB) dan menghambat perekonomian Indonesia pertumbuhan meskipun kebijakan sudah dilakukan, namun masih ada saja pihak yang menyalah gunakan kebijakan tersebut, seperti sebagai kegiatan belajar dan bekerja di rumah di gunakan untuk liburan ke luar kota. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memperluas dan mempercepat penyebaran virus Corona, baik dari yang disebarluaskan oleh pengunjung kepada masyarakat lokal, serta disebarluaskan oleh masyarakat lokal kepada pengunjung.

Wabah virus corona di China juga ditengarai berimbas ke Indonesia, perdagangan pertanian. Selama ini ekspor kelapa sawit merupakan salah satu ekspor terbesar kontributor ke Cina. Namun, pada Februari 2020, realisasinya baru mencapai 84.000 ton. Angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya Januari 2020 sebesar 487.000 ton dan pada periode yang sama tahun 2019 mencapai 371.000 ton (Detik.com, 2020).

Dari sisi impor pangan, Indonesia yang memiliki ketergantungan bawang putih dari China, hanya dapat mengimpor bawang putih dari China sebesar 23.000 ton pada Februari 2020. Angka ini juga turun drastis jika dibandingkan dengan impor tahun sebelumnya yang mencapai 583.000 ton (finance.detik.com, 17 Februari 2020). Pada Februari 2020, penurunan impor terbesar China juga terlihat pada komoditas buah-buahan. Impor komoditas buah-buahan turun signifikan sebesar 78,88% dari USD160,4 juta menjadi USD33,9 juta (Kata Data, 2020).

Sejak merebaknya virus Corona, selain memberlakukan kebijakan pembatasan impor hewan hidup dari China, pemerintah juga menghentikan penerbangan dari dan ke China per 5 Februari 2020. Yang tentunya juga akan mempengaruhi sektor pariwisata Indonesia. Banyak perusahaan perjalanan dan penerbangan menderita kerugian akibat penghentian penerbangan dari dan ke China. Sejak pelaksanaan, jumlah Cina kunjungan wisatawan ke Bali mengalami penurunan. Di tahun 2019, dari 6,3 juta wisatawan asing, sebanyak 1.185.519 wisatawan atau 18,2% berasal dari China. Namun pada Januari hingga pertengahan Februari 2020 tercatat 22.000 turis China batal ke Bali (Tribunnews, 2020). Hal ini sangat mempengaruhi perekonomian Provinsi Bali. Pada Februari 2020, penerimaan negara menunjukkan peningkatan dari Januari 2020. Realisasi penerimaan negara dan hibah per akhir Februari 2020 mencapai Rp216,61 triliun atau 9,70 persen dari target pada APBD 2020. Realisasi tersebut didukung oleh penerimaan pajak tercatat tumbuh positif, yaitu tumbuh sebesar 0,3 persen. Dengan seperti itu dengan ketentuan, sampai dengan akhir Februari 2020 realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp177,96 triliun atau telah mencapai 9,54 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp38,62 triliun (10,52 persen dari target), dan hibah sebesar Rp0,03 triliun (5,73 persen dari target) (Kementerian Keuangan RI, 2020). Pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh pertumbuhan pajak bumi dan bangunan Penerimaan Negara (PBB) dan pajak lainnya, masing-masing tumbuh 95,00 persen (YoY) dan 5,67 persen (YoY). Untuk PPh Nonmigas, pencapaian penerimaannya masih didukung oleh penerimaan PPh 21 yang tumbuh 10,08 persen, PPh 25/29 instansi, dan PPh Final. realisasi dari penerimaan bea dan cukai mencapai 11,22 persen dari target dalam APBN 2020 dan mampu tumbuh 51,52 persen (YoY). Realisasi sebenarnya dari penerimaan didukung dengan penerimaan cukai dan bea masuk (BM). Pertumbuhan Bea dan Cukainya penerimaan tersebut masih berasal dari penerimaan pajak yang tercatat sebesar 89,20 persen (YoY) (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Realisasi PNBP hingga akhir Februari 2020 mencapai Rp38,62 triliun atau 10,52 persen dari target dalam APBD 2020. Pencapaian realisasi PNBP terutama didominasi oleh realisasi PNBP SDA dan PNBP lainnya, masing-masing sebesar Rp20,92 triliun dan Rp15,98 triliun. Realisasi PNBP SDA Migas (Alam sumber daya migas) Indonesia Crude Price (ICP) periode Januari-Februari 2020 tercatat sebesar USD61,00/barel atau lebih tinggi USD2,07/barel dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya sebesar USD58,93/barel (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Peran Pemerintah

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui jaring pengaman sosial membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dinilai

berdampak ekonomi terhadap pkerumunan. Artinya, Pemerintah serius memberikan stimulus ekonomi kemas.

Pemerintah menyadari dampak non-medis yang sebenarnya dari wabah yang disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2 dan dapat dilihat dari banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian karena mereka harus di rumah. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upayamembantu perekonomian Masyarakat melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan yang membatasi peredaran aset di kalangan orang kaya (Martinelli, 2019). Beberapa kebijakan tersebut antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan dana desa. BLT tersebut dianggarkan menggunakan Rp22,47 triliun. Selain itu, ada "Kartu Prakerja" dengan Insentif bulanan yang mencapai Rp3,5 juta per orang. Bukan hanya itu yang dimiliki pemerintah juga meluncurkan penurunan tarif listrik 50 persen untuk pelanggan kapasitas 450 watt selama tiga bulan (Arifin, 2020).

Beberapa langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: percepatan realisasi Belanja kementerian/lembaga, khususnya belanja bantuan sosial (seperti PKH dan kesehatan), sebagai serta non operasional belanja, Mendorong pusat pariwisata melalui berbagai dukungan program, seperti percepatan pengembangan lima destinasi wisata super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Pemerintah juga akan mengatur fiskal dan non-kebijakan fiskal untuk merangsang sektor pariwisata, mendorong dan mempercepat padat karya pengeluaran untuk kegiatan produktif yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti infrastruktur belanja di pusat dan daerah, mengoptimalkan peran APBN sebagai fleksibelinstrumen dalam menanggapi situasi ekonomi (countercyclical) dengan tetap berada dalam batas-batasaman dan terkendali, percepatan pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Kementerian Keuangan RI, 2020).

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19, selain menjadi masalah kesehatan global, juga telahimplikasinya terhadap perekonomian di Indonesia. Indonesia berpotensi tumbuh negatif 0,4% yangadalah skenario terburuk. Sektor ekonomi yang paling terkena dampak COVID-19 adalah rumah tanggasektor. Mengoptimalkan potensi dalam negeri, penurunan BI-7 Day Reverse Repo Rate(BI7DRR), suku bunga fasilitas deposit, dan suku bunga fasilitas peminjaman, perkembangan ekonomi global dan domestik yang dilakukan oleh Indonesia dinilai justru agar inflasi dan stabilitas tetap terkendali

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, D. (2020). Jaringan pengaman sosial kurangi dampak ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
- CNBC Indonesia. (2020). PSBB berlaku per hari ini, apa dampaknya ke ekonomi Jakarta.
- CSIS Indonesia. (2020). Mengukur dampak COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia 2020. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2020a). Menjaga ekonomi Indonesia terhadap dampak negatif pandemik COVID-19. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Situasi terkini perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 25 April 2020.

Martinelli, I., et al. (2019). Community economic development prospect based on wakaf funds.
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 409-423